

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2009). *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran. (1997). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. (1985). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2002). *Hukum Administrasi Negara dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance (Cet. II)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Kelsen, Hans. (1973). *General Theory of Law and State (Translated by Anders Wedberg)*. New York: Russell & Russell.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. (2007). *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusumawati, Lanny. (2005). *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Sleman: LaksBang Yogyakarta.
- Lotulung, Paulus E. (2013). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Peradilan Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, S.F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ochtorina, Dyah & Efendi, A'an. (2013). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Prajitno, Andi. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, Maruarar. (2015). *Hukum Administrasi Negara dan Implikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah

- Azhary, Ido. (2018). "Pembentukan Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3).
- Hadi, I. (2025). "Analisis Hukum Transformasi Regulasi Jabatan Notaris di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 12(1).
- Hadjon, Philipus M. (1997). "Tentang Wewenang". *Yuridika*, No 5 & 6 Tahun XII.
- Indrati, Maria Farida. (2015). "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3).

- Mulyata, Jaka. (2015). "Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan MK No. 100/PUU-X/2012". *Skripsi/Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Narosama, Deno Ukida. (2019). "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50P/HUM/2018". *Skripsi/Tesis*, Universitas Brawijaya.
- Nuh, Muhammad. (2018). "Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum*.
- Rivaldo, Rian. (2022). "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50P/HUM/2018 terhadap Syarat Pengangkatan Notaris". *Skripsi/Tesis*, Universitas Islam Indonesia.
- Sujata, Antonius. (2013). "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik". *Jurnal Perspektif*.
- Tangkere, Neltje L. H. (2016). "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Landasan Hukum Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan". *Jurnal Lex Et Societatis*, 4(1).
- Wahyudi, R. (2024). "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Take Over Rumah Dalam Menjamin Kepastian Hukum". *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4).

C. Internet / Sumber Elektronik

- Gramedia Literasi. "Teori Kepastian Hukum". Diakses pada 15 Desember 2025 dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- LBH Kapuas Raya Indonesia. (2024). "LBH Kapuas Raya Indonesia Jamin...". Diakses pada 17 Oktober 2025 dari <https://www.lbhkapuasrayaindonesia.or.id/>
- Wikipbn.org. "Jabatan". Diakses pada 13 Oktober 2025 dari <https://wikipbn.org/jabatan/>

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan dan;

Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-

AH.02-37 tahun 2024.

Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 terhadap calon notaris

